

BAB I

PENDAHULUAN

Masalah lingkungan yang dihadapi bumi saat ini adalah sebuah bentuk dari peradaban yang “salah” dari perkembangan manusia itu sendiri, yang cenderung egois terhadap nilai-nilai moral diluar kepentingan manusia dan jauh dari rasa tanggung jawab. Permasalahan lingkungan yang sebagian besar bersumber dari kegiatan manusia seperti pencemaran, kerusakan ekosistem laut, tanah dan sebagainya pada akhirnya mengancam kehidupan manusia, terjadinya bencana alam berupa banjir, tanah longsor dan dampak perubahan iklim lainnya telah banyak menelan korban di berbagai belahan bumi.

Dampak kerusakan lingkungan yang telah dirasakan manusia sekarang ini merupakan bentuk dari kemunduran moral yang dimiliki manusia, kemunduran moral terhadap alam dimana secara mendasar telah dipengaruhi oleh cara pandang yang menganggap manusia adalah pusat dari alam semesta sehingga cenderung berbuat sewenang-wenang terhadap alam. Cara pandang yang seperti diatas seharusnya diubah dengan pemikiran yang lebih terpusat pada keseluruhan nilai dari sebuah ekosistem sehingga akan terbentuk sebuah moral dan cara pandang yang saling menghargai satu sama lain dalam sebuah ekosistem itu sendiri.

Cara pandang yang menilai manusia merupakan pusat dari seluruh alam telah berkembang dan melekat dalam kehidupan manusia sehingga permasalahan lingkungan makin kompleks dan menjadi permasalahan yang serius dari tingkat individu sampai pada tingkat internasional, sehingga baik kiranya untuk kita

menelaah lebih lanjut bagaimana cara pandang diatas telah menjadikan permasalahan lingkungan menjadi lebih kompleks.

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Perkembangan cakupan studi Ilmu Hubungan Internasional telah menjadikan Ilmu Hubungan Internasional semakin luas dan semakin kompleks. Pada awal perkembangannya studi ini hanya mencakup interaksi antar bangsa dalam hal perang dan damai namun semakin berkembangnya zaman dan semakin beragamnya kepentingan juga pada akhirnya mengembangkan cakupan serta isu yang dipelajari dan hampir meliputi seluruh aspek kehidupan (politik, sosial, budaya, lingkungan) dan berbagai isu lainnya. Isu lingkungan menjadi topik yang mendapat porsi yang lebih akhir-akhir ini terkait dengan permasalahan menyangkut lingkungan yang hampir tidak mendapatkan titik temu dalam pandangan masyarakat.

Global Warming atau pemanasan global yang sekarang ini melanda bumi diyakini sebagai hasil dari manusia yang sangat eksploitatif terhadap alam. Eksploitasi hutan yang besar telah mengakibatkan luas hutan makin sempit sebagai paru-paru dunia, selain itu juga industrialisasi telah mengakibatkan dampak polusi bagi bumi, ditambah lagi dengan pemborosan terhadap bahan bakar fosil (BBF). Muncul dan berkembangnya perusahaan besar yang tidak ramah lingkungan dengan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya ikut andil dalam pemanasan global dewasa ini.

Pada awal tahun sembilan puluhan, hal yang menyita perhatian dunia internasional adalah masalah kelangsungan bumi dengan melihat kondisi lingkungan yang semakin memburuk, kualitas lingkungan tersebut telah membawa kepada banyaknya permasalahan khususnya menyangkut ketahanan dan kelangsungan hidup manusia di bumi. Pada akhirnya hal tersebut membawa kepada komitmen setiap negara untuk bersama-sama memperbaiki kualitas lingkungan yang ada dengan komitmen bersama pada konvensi perubahan iklim yang difasilitasi oleh Perserikatan bangsa-bangsa (PBB).

Namun komitmen bersama yang telah dibina selama lima belas tahun lebih ini berlangsung, cenderung diliputi oleh beberapa kepentingan ekonomi beberapa negara serta mencari kambing hitam atas permasalahan yang berakhir pada “kemandulan” kebijakan dari perjalanan konvensi perubahan iklim ini sendiri. Egosime masing-masing negara dalam konvensi ini sangat terlihat dengan segala rasionalisasi untuk menghindar dari komitmen untuk memperbaiki kualitas lingkungan yang ada. Ini merupakan hal yang menarik untuk diungkap dan dipelajari secara mendalam yakni berupa egoisme terhadap lingkungan dengan melihat etika lingkungan yang berkembang di dunia saat ini.

Dengan uraian diatas dan dengan melihat kondisi yang terjadi pada bumi sekarang, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dan memilih judul “Kemenangan *Shallow Ecology* dalam Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim”.

1.2 Penegasan Judul

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba memberikan penegasan terhadap judul yang diangkat agar tumbuh kesepahaman terhadap judul skripsi ini.

Kemenangan yang dimaksudkan adalah kuatnya pengaruh gerakan *Shallow Ecology* terhadap mekanisme yang dihasilkan dalam Konevensi PBB mengenai perubahan iklim sehingga mekanisme yang dihasilkan tampak sebagai bentuk dari etika *Shallow*. *Shallow Ecology* merupakan etika lingkungan yang meletakkan pola hubungan manusia terhadap alam sebagai relasi instrumental¹. Sehingga dalam hal ini alam diartikan sebagai alat untuk menunjang kepentingan manusia, kepentingan manusia diatas segala-galanya dan juga tidak melihat adanya moral manusia terhadap alam. Sementara itu Konvensi PBB tentang perubahan iklim adalah sebuah kerangka kerja PBB untuk mengatasi perubahan Iklim dengan tujuan utama menstabilkan sistem iklim bumi dengan mengurangi konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tingkat tertentu dari manusia yang membahayakan sistem iklim².

1.3 Tujuan Penulisan

Kegiatan penulisan ini secara umum dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap beberapa isu konvensi perubahan iklim yang sangat dipengaruhi oleh etika *Shallow Ecologist (SE)* dengan melihat dari berbagai kebijakan yang telah ditetapkan atau dihasilkan. Selain itu juga bermaksud untuk memberikan wawasan

¹ Sony Keraf, Etika Lingkungan : *Antroposentrisme*: (Jakarta : Kompas, 2002)hlm.34

² Daniel Murdiyarso, Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim : *Konvensi perubahan Iklim*: (Jakarta :Kompas 2003)hlm24

baru terhadap berbagai perspektif lingkungan yang mempengaruhi dunia sehingga dapat mengetahui fenomena lingkungan yang terjadi dewasa ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga mempunyai beberapa tujuan diantaranya:

1. Menjawab permasalahan yang diungkapkan dengan menggunakan beberapa teori dan konsep yang ada kemudian membuktikan hipotesa yang telah didapatkan sebelumnya dengan menggunakan fakta dan data yang ada.
2. Memperbanyak kajian ilmiah studi Ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam bidang lingkungan.
3. Memberikan gambaran secara luas terhadap perkembangan dunia terhadap lingkungan serta etika lingkungan yang mempengaruhinya.
4. Untuk memenuhi mata kuliah penulisan skripsi yang digunakan sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana (S-1) pada jurusan Ilmu Hubungan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

1.4 Latar Belakang Masalah

Isu lingkungan dalam hubungan internasional kontemporer merupakan isu yang paling menyita perhatian dunia, hal ini tentunya terkait dengan beberapa kejadian atau bencana alam yang melanda bumi yang telah menelan banyak korban serta kerugian di beberapa wilayah di belahan bumi.

Lingkungan menjadi agenda politik internasional yang mengharuskan setiap negara untuk melaksanakan komitmen dalam menyelesaikan permasalahan

lingkungan. Dalam hal ini negara maju serta perusahaan multinasional menjadi sorotan utama terkait dengan kepentingan ekonomi yang ada dibalik terjadi kerusakan lingkungan. Negara maju dengan tingkat industrinya dan juga perusahaan multi nasional yang beroperasi di beberapa negara berkembang yang kerap melakukan eksploitasi sumber daya alam (SDA) dan akhirnya merugikan negara berkembang. Tentunya hal inilah yang menjadi alasan bahwa negara maju seakan-akan menjadi aktor dominan dalam setiap komitmen yang disepakati menyangkut kerusakan lingkungan.

Komitmen berupa perbaikan kualitas lingkungan telah dilakukan sejak KTT Bumi di Montreal 1992 namun dengan rentan waktu yang cukup lama belum mampu untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan berbalik menjadikan kondisi lingkungan makin memperhatikan. Keberadaan negara maju dan perusahaan multinasional sebagai aktor yang dominan menjadikan komitmen terlampau menjadi permainan, artinya kebijakan tentang perbaikan kualitas lingkungan dapat dikendalikan dengan kekuatan ekonomi yang mereka bawa sehingga komitmen perbaikan kualitas lingkungan pun dijadikan ajang untuk meraih kepentingan ekonomi negara maju dengan merusak kondisi lingkungan itu sendiri.

Hal diatas dapat kita lihat sebagai sebuah etika yang dangkal (*Shallow*) yang melihat bahwa kepentingan manusia diatas segalanya sehingga mahluk diluar manusia dilihat sebagai objek, alat dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri³. Sehingga tanggung jawab manusia terhadap alam tidak

³ Sony Keraf, Etika Lingkungan : *Antroposentrisme*: (Jakarta : Kompas, 2002)

berlaku atau merupakan hal yang tidak masuk akal, walaupun tuntutan itu masuk akal akan dihitung sebagai pengertian tidak langsung, yaitu pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap sesama, dalam pengertian bahwa walaupun ada tuntutan kewajiban terhadap alam itu semata-mata adalah demi memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Dengan pandangan *Shallow* yang mengutamakan kepentingan manusia serta mengabaikan kepentingan makhluk lainnya menjadikan perbaikan kualitas lingkungan yang ada sekarang ini masih mengalami keterpurukan.

Dalam perkembangan hubungan internasional *Shallow Ecology* merupakan etika yang telah mengakar dengan kuat di negara-negara maju yang memiliki tingkat perekonomian tinggi namun mengabaikan kondisi lingkungan hidup, China dan Amerika Serikat yang menitik beratkan pada hiperekonomi sehingga SDA terkuras dan permasalahan pun mulai melanda Cina dengan cuaca yang begitu panas begitu juga dengan AS yang sering mengalami kejadian alam yang ekstrim.

Selama berlangsungnya pertemuan tentang perbaikan kualitas lingkungan etika *Shallow* selalu tercermin dalam setiap kebijakan yang ada, salah satu contoh bahwa KTT Bumi 1992 yang berorientasi mengatasi permasalahan lingkungan kemudian menghasilkan kebijakan yang berbalik memperburuk kualitas lingkungan dengan mengukuhkan pembangunan ekonomi dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Kemudian adanya *Berlin Mandate* pada konvensi perubahan iklim pertama yang ada tidak dapat menghasilkan keputusan yang ekologis, dan hanya berfokus pada persoalan siapa yang salah dan yang siapa yang

benar menjadi ajang justifikasi tidak ada sebuah rencana menyangkut permasalahan lingkungan dan pada Kyoto, Jepang terlihat bagaimana dominasi negara maju sehingga mengakibatkan mekanisme yang dihasilkan pun tampak begitu dangkal dengan mengabaikan persoalan lingkungan dan kemudian mengundurkan diri serta tidak berkomitmen untuk menanggulangi permasalahan lingkungan yang ada.

Munculnya konsep pembangunan berkelanjutan yang selalu menilai perkembangan dari segi pertumbuhan ekonomi memacu setiap negara untuk meningkatkan perekonomiannya dengan menghiraukan beberapa aspek yang lainnya terutama dalam hal ini adalah lingkungan. Lingkungan dinilai sebagai objek ekonomi, sehingga menciptakan persaingan global antara negara maju dengan negara berkembang dalam memacu pertumbuhan ekonominya⁴. Ekonomi global telah membawa kondisi lingkungan makin terpuruk mengingat ekspansi besar-besaran terhadap lingkungan, hutan telah dibuka untuk dijadikan kawasan pertanian, hasil hutan dikeruk untuk kebutuhan industri, lahan penghijauan telah dijadikan perumahan dan banyak lagi lahan atau kawasan hijau dibangun untuk properti. Investasi ekonomi menjadi alasan eksploitasi lingkungan secara besar-besaran⁵.

Dengan adanya dominasi kepentingan ekonomi terhadap kepentingan lingkungan menjadikan kondisi bumi mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi begitu

⁴ Lihat <http://www.suamerdeka.com/harian/0502/16/opi3.htm>

⁵<http://cfssyogya.wordpress.com/2007/03/15/harmonisasi-kepentingan-ekonomi-dan-ekologi/>Harmonisasi Kepentingan Ekonomi dan Ekologi

banyak anomali seperti masa panen dan alih tanam dalam pertanian tidak dapat diprediksikan dengan kondisi musim yang juga tidak dapat diprediksikan kembali. Nilai ketidakseimbangan tersebut kemudian menjadi permasalahan serius dalam perkembangannya karena menyangkut kelangsungan manusia selanjutnya dan juga menyangkut generasi yang akan datang. Makin berkembangnya teknologi di satu sisi telah mendorong terciptanya berjuta karya yang tidak lagi memperdulikan lingkungan dan hanya berorientasikan pada kebutuhan manusia saja, begitu banyaknya mobil-mobil yang bertenaga besar sekaligus “boros” dalam penggunaan bahan bakar. Begitu nikmatnya makanan yang segar namun di sisi lain telah mengeluarkan gas yang berbahaya bagi lingkungan dan banyak hal lainnya seperti kekayaan melimpah, namun kemiskinan kian bertambah, teknologi makin maju, degradasi lingkungan makin cepat dan sebagainya sesuai dengan ironi pembangunan dalam perubahan iklim⁶. Era industrialisasi disinyalir sebagai biang kerok terhadap permasalahan yang terjadi dengan “membabibuta” sumber daya alam (SDA) yang makin memperburuk kondisi lingkungan.

Berbalik dengan kondisi etika diatas etika *Deep Ecology* (DE) yang memiliki pandangan berbeda mengenai masalah lingkungan, DE cenderung memaknai bahwa semua yang hidup dan ada di dalam kehidupan mempunyai nilai dan harkat di tengah komunitas kehidupan sehingga alam dan manusia memiliki kedudukan yang sama sehingga tanggung jawab antara manusia dan alam haruslah terjalin. Manusia bukanlah pusat dari moral melainkan harus dilihat dari seluruh biosfer di muka bumi. Hubungan antara manusia dan alam memiliki kedudukan yang sama,

⁶ Dr. A Atiq Rahman, Direktur Bangladesh Center for Advanced Studies, 2007)

sehingga keberadaan dalam sebuah ekosistem bukan dilihat dari tingkatan hirarkis, dengan demikian antara manusia dengan seluruh komponen ekosistem akan tercipta keseimbangan yang pada akhirnya membawa kepada keselarasan manusia dengan lingkungannya.

Di sisi yang lain, era industrialisasi yang menjadi penyebab utama dalam kerusakan lingkungan seharusnya dalam pandangan DE adalah dengan tidak melihat SDA sebagai fungsi ekonomisnya saja⁷, artinya produksi dan nilai konsumtif seharusnya dapat diperhitungkan sehingga adanya ruang dan waktu untuk melakukan perbaikan pembaruan kondisi SDA itu terhadap kepunahan dari eksploitasi yang sangat berlebih. Inilah yang mendasari bahwa etika lingkungan yang *deep* menyimpulkan bahwa ketidakseimbangan hubungan inilah yang menjadikan bumi saat ini dalam perubahan iklim yang ekstrim.

Masyarakat Internasional mulai menanggapinya dengan bukti-bukti ilmiah terhadap sistim iklim di dunia dengan kegiatan manusia yang tengah berlangsung sehingga dibentuklah IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) yang bertugas untuk mengetahui dan penelitian terhadap perubahan iklim tersebut, yang pada akhirnya membawa PBB untuk membuat kerangka kerja yang dikenal dengan konvensi perubahan iklim PBB sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kerusakan lingkungan yang telah tampak dengan jelas menimpa dunia pada saat ini.

⁷ Sony Keraf, Etika Lingkungan : *Sikap DE terhadap Isu Lingkungan*: (Jakarta : Kompas, 2002)

Konvensi perubahan Iklim PBB (UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) setelah diterima secara universal dalam dunia sebagai sebuah komitmen bersama tentang perubahan iklim. UNFCCC telah berjalan lebih dari satu dasawarsa namun kebijakan lingkungan yang diperoleh sebagian mengalami jalan buntu, dan berbalik menjadi pertikaian dan perebutan kepentingan antara negara maju yang diklaim sebagai penyebab kerusakan lingkungan dengan negara berkembang sebagai korban atas kerusakan lingkungan. Tentunya hal ini ironis sekali dengan kondisi lingkungan yang mengisyaratkan untuk dipercepatnya perbaikan kualitas lingkungan. Terlihat juga tanggapan dingin dari beberapa negara dalam perjalanan konvensi perubahan iklim dimana pada awalnya hanya ditandatangani oleh 55 negara pada tahun 1992 dan baru pada penghujung tahun 2007 ditandatangani oleh 195 negara⁸. Sungguh kesadaran yang sangat lamban mengingat kebutuhan untuk perbaikan lingkungan harus segera dilakukan, para pelaku pengerusakan lingkungan pun terasa sulit untuk mengeluarkan dana untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang telah dirusak⁹.

Diselenggarakannya UNFCCC pada dasarnya adalah terobosan yang sangat tepat sebagai langkah antisipasi jangka pendek terhadap berbagai masalah yang ditimbulkan oleh perubahan iklim yang melanda bumi, yang secara langsung berdampak pada banyaknya bencana alam yang terjadi, kejadian ekstrim kerap terjadi dan bahkan telah menelan banyak korban terhadap ketidakseimbangan kondisi lingkungan saat ini, banjir selalu terjadi di berbagai wilayah di dunia.

⁸ Lihat, *Sekilas Tentang Pemanasan Global*, IPCC : 2007

² <http://www.suarapembaruan.com/News/2005/11/24/Kesra/kes01.htm>

Beberapa permasalahan serius dihadapi oleh dunia saat ini. Iklim yang ada sudah mulai berubah dengan pencemaran udara oleh bahan bakar fosil, eksploitasi besar-besaran perusahaan tambang, properti dan lainnnya sebagai penyumbang terbesar kerusakan iklim di bumi¹⁰. Hampir seluruh aspek kehidupan mendapatkan dampak yang serius. Menurut data, tahun 2007 saja diwarnai oleh bencana yang datang beruntun di seluruh dunia, kerugian akibat bencana ini tidaklah sedikit, angkanya mencapai US\$ 75 miliar. Sementara itu di negara berkembang bencana alam tahun ini telah mengakibatkan 20 ribu orang tewas¹¹. Sebuah angka yang sangat mengkhawatirkan mengingat komitmen berupa konvensi atas kerusakan lingkungan telah berjalan lebih dari lima belas tahun sejak Mandate Berlin 1995.

Konvensi perubahan iklim harus dapat memaksakan negara-negara maju mengurangi polusi industrinya. Bahkan Amerika sebagai penyumbang emisi karbon tertinggi di dunia, malah berbalik badan dari kesepakatan yang sempat ditandatanganinya itu. Pada saat yang sama, lembaga ini juga tak mampu menuntun negara berkembang untuk merawat dan memelihara hutannya.

Dalam menanggapi permasalahan lingkungan ini, konvensi haruslah berkaca pada cara pandang yang dibutuhkan bumi pada saat sekarang ini yaitu DE mengingat etika ini telah memberikan perhatian yang seimbang dengan menempatkan persoalan lingkungan ini pada titik egoisme manusia yang harus ditinggalkan dan pemanfaatan terhadap SDA haruslah diperhitungkan secara holistik menyangkut

¹⁰ Daniel Murdiyarsso, Sepuluh Tahun perjalanan Negosiasi KOnvensiPerubahan Iklim.hlm xii

¹¹ UN Climate Change, *bencana Alam 2007*

kesatuan seluruh komponen dalam sebuah ekosistem yang ada sehingga permasalahan lingkungan yang dihadapi dapat secara bertahap diselesaikan.

Sampai pada pertemuan Cop 13 Bali Desember 2007 yang menghasilkan “Bali Road Map” juga masih kental dengan nuansa tarik ulur kepentingan antara negara maju dengan negara berkembang, negara peserta konvensi masih disibukkan dengan nilai dan angka yang tepat untuk memperjualbelikan karbon yang dihasilkan. Pembahasan yang meyangkut kepedulian terhadap lingkungan tidak tampak, dalam artian mekanisme yang telah dibuat dan diputuskan hanya menjadi tameng bagi beberapa oknum untuk mengalihkan perhatian hanya sebatas nilai dan angka jual beli karbon, muatan ekonomi dalam konvensi perubahan iklim PBB ini sangat dominan tercermin dalam beberapa mekanisme yang telah dihasilkan dalam konvensi tersebut.

Untuk melihat secara jelas konvensi perubahan iklim di Bali sebagai sebuah pertarungan etika lingkungan ada beberapa prinsip dasar dari etika lingkungan yang muncul dalam persidangan konvensi ini. *Pertama* adalah munculnya isu mengenai sumber daya alam yang secara jelas dinilai sebagai satu-satu komponen dari bumi yang harus dimaksimalkan untuk kepentingan manusia, hal ini dikuatkan dengan tidak adanya pembatasan yang jelas terhadap industrialisasi sehingga tentunya membuka ruang bagi tindakan eksploitatif terhadap alam. Dan sebaliknya etika *deep* menilai hal tersebut sebagai sebuah kesalahan besar yang seharusnya melihat alam sebagai sebuah kesatuan yang luas secara fungsi sehingga tidak dapat dilihat dalam satu fungsi yakni ekonomi. Yang kedua adalah

menyangkut pembahasan transfer teknologi yang mengharuskan negara maju untuk memberikan teknologi dikarenakan teknologi dan industri yang besar akan mampu mendorong kepada kehidupan yang lebih baik walaupun pada hakikatnya akan mengorbankan aspek-aspek kehidupan lainnya seperti lingkungan yang akan terus dirusak dengan akan ekspor teknologi yang tidak ramah lingkungan. hal ini tentunya berbalik terhadap pandangan etika *deep* bahwa teknologi dan industrialisasi yang besar di negara maju harus dibatasi atau tepat guna sesuai dengan kebutuhan vital manusia sehingga dapat meminimalisir kerusakan terhadap alam. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari table di bawah ini :

Tabel 1.1 Etika Lingkungan dalam COP 13 Bali

Deep Ecology	Shallow Ecology
<ul style="list-style-type: none"> • Nilai intrinsik alam sangat penting bagi seluruh makhluk. • Fungsi alam bukan hanya pada fungsi ekonomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eksploitasi sumber daya alam bagi kebutuhan manusia dan dapat berlangsung dengan pemberian kompensasi terhadap pihak yang dirugikan (negara bukan alam)
<ul style="list-style-type: none"> • Industri harus dibatasi pada tingkat kebutuhan vital manusia saja 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri harus diperbesar dengan teknologi yang tinggi dan harus diikuti oleh semua negara sehingga transfer teknologi harus dijalankan. Dan lingkungan menjadi subordinasi dari industri tersebut.

Konvensi yang diharapkan mampu untuk menghasilkan kebijakan yang strategis untuk mengatasi kerusakan lingkungan kemudian dijadikan ajang untuk mencari dan meraih kepentingan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang. Hal ini terkait dengan diperlukannya perubahan politik yang mendasar untuk melahirkan kebijakan yang lebih mendorong kepada perbaikan kualitas

lingkungan. Konvensi perubahan iklim PBB, yang cenderung mekanistik dalam penentangan polusi dan pengurasan sumber daya¹² dan juga mempercayai bahwa eksploitasi dapat berjalan bersamaan tanpa merubah pola konsumsi¹³, akan menjadi permasalahan yang terus membawa kepada keterpurukan lingkungan serta permasalahan yang baru bagi kelangsungan dan ketahanan lingkungan itu sendiri.

1.5 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menetapkan pokok permasalahan yang bisa dijadikan sumber penelitian yaitu : Bagaimana hasil mekanisme Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim menjadi bentuk kemenangan kalangan *Shallow Ecology* ?.

1.6 Kerangka Berpikir

Dalam menjawab dan membuktikan bahwa konvensi perubahan iklim dunia PBB memiliki etika yang dangkal menyangkut mekanisme yang telah dihasilkan sehingga perlu adanya landasan pemikiran yang digunakan untuk pembuktian secara ilmiah baik menggunakan teori maupun konsep.

1.6.1 Teori Etika Lingkungan (Antroposentrisme)

Dominasi pemikiran atau cara pandang *Shallow Ecology* (SE) dalam melihat kerusakan lingkungan dapat dihubungkan dengan teori lingkungan yang

¹² Husein Heriyanto, "Menanam Sebelum Kiamat" : *Respons Realisme islam Terhadap Krisis Lingkungan* hlm.93-94

¹³ Mutia Hariati Hussin. *Jurnal Hubungan Internasional : Relalisme dalam pemikiran Ekologis* hlm.73-74

antroposentrisme, menurut Sony Keraf, antroposentrisme adalah etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kaitannya dengan alam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya¹⁴.

Keberadaan manusia sebagai pusat dari alam semesta menurut Keraf dapat berarti bahwa tumbuh-tumbuhan dan hewan dan seluruh alam semesta memiliki nilai karena mempunyai fungsi ekonomis bagi manusia, yang berarti bahwa kepentingan manusia terutama yang menyangkut kepentingan ekonomi dapat dieksploitasi untuk memenuhi kepentingan manusia. Manusia menjadi ukuran nilai bagi benda-benda di sekitarnya¹⁵. Ketika manusia akan memperoleh kepentingan dengan mengeksploitasi alam maka itu menjadi hal yang benar dan manusia juga pada dasarnya tidak memiliki tanggung jawab secara manusiawi terhadap alam.

Dalam kaitannya dengan etika lingkungan, Antroposentrisme memiliki pandangan yang cenderung mengabaikan masalah-masalah lingkungan yang tidak langsung menyentuh kepentingan manusia¹⁶ seperti bagaimana sikap tindakan manusia untuk membuang sampah pada sungai dan menebang pohon secara eksploitatif untuk memenuhi kepentingan manusia semata. Selain itu juga mengabaikan moral terhadap alam, sejauh menyangkut kepentingan manusia maka moral terhadap alam itu tidak ada, dan yang terakhir adalah menyangkut kepentingan manusia

¹⁴ A.Sony Keraf *Etika Lingkungan* 2005 hlm.33

¹⁵ <http://nelkazz.wordpress.com/2008/04/21/antroposentrisme-akar-kerusakan-lingkungan>

¹⁶ A.Sony Keraf *Etika Lingkungan* 2005 hlm.47

dalam jangka waktu yang pendek artinya kepentingan berupa ekonomi selalu menjadi prioritas dan lingkungan hidup yang ada akan dipertaruhkan demi kepentingan manusia yang selalu berubah-ubah.

Tanggung jawab manusia pada hakikatnya adalah ketika permasalahan lingkungan itu menyangkut kewajiban terhadap manusia dan bentuk tanggung jawab terhadap manusia lainnya. Artinya bahwa kondisi alam yang ada sekarang ini telah menyebabkan banyaknya manusia lain di belahan dunia terkena dampaknya. Menurut Arne Naess¹⁷, Antroposentrisme adalah bentuk dari etika lingkungan yang dangkal mengingat bahwa manusialah yang mempunyai wewenang dan kekuasaan dalam mengelola alam, serta bagaimana alam ini mau dijadikan. Teori ini yang juga mendominasi cara pandang manusia terhadap lingkungan merupakan egoisme, karena mengutamakan kepentingan manusia dan kepentingan makhluk lainnya tidak dipertimbangkan.

Landasan berpikir antroposentrisme dapat menjawab beberapa fenomena yang terjadi pada latar belakang permasalahan yang ada diatas. Landasan antroposentrisme tumbuh dan mengakar sebagai bentuk dari cara pandang filosof barat yang bercorak liberal dalam berpikir khususnya menyangkut hubungan manusia dengan alam yang dalam hal ini dilatar belakangi oleh teolog Kristen¹⁸, mengingat bahwa teolog keagamaan mempunyai kekuatan yang absolute sehingga terlihat dari ajaran tentang penciptaan dan kedudukan manusia yang di muka bumi ini yang telah diserahkan oleh Tuhan untuk menguasai alam untuk

¹⁷ Arne,Naess, *The Deep Ecological Movement*.hlm 414-416, disadur dari A.Sony Keraf *Etika Lingkungan :Sikap DE Terhadap Isu Lingkungan*. 2005 hlm.97-98

¹⁸ A.Sony Keraf *Etika Lingkungan :Argumen Antroposentrisme*. 2005 hlm.37

menunjang kehidupan manusia itu sendiri, hak yang diberikan Tuhan kepada manusia itu dalam teolog kristen telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang rakus, mencerminkan kesombongan manusia karena menyadari dirinya sebagai satu-satunya ciptaan yang berakal budi dan “diberi” wewenang oleh sang pencipta untuk menguasai alam semesta. Yang paling luar biasa adalah antroposentrisme telah menjadi bagian atau membentuk peradaban manusia itu sendiri.

Dengan kemampuan akal budinya manusia mengembangkan pemikirannya secara distantiatif, melihat alam dan makhluk-mahluk lainnya sebagai *non-sentient being* (makhluk tak-berperasaan), tidak memiliki hak pada dirinya sendiri, tidak perlu dipertimbangkan secara moral, dan karena itu tidak apa-apa kalau dieksploitasi. Di sini kita teringat pandangan Rene Descartes yang secara menyedihkan menempatkan alam tidak saja sebagai *res extensa* yang tidak berkesadaran, tetapi juga yang memiliki eksistensi sejauh dipikirkan akal budi manusia. Selain itu juga filsuf Aristotelian dalam “*Great Chain Of Being*”¹⁹ telah membuat egoisme dari pemikir barat untuk memposisikan dirinya sebagai makhluk yang hampir sempurna mengingat bahwa posisi manusia dalam rantai makanan telah diciptakan oleh Tuhan dalam kasta yang tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya²⁰. yang berarti pula manusia dapat melakukan apapun terhadap makhluk yang ada dibawahnya dan itu pada prinsipnya adalah suatu kesahan bagi pandangan ini ditambahkan oleh Immanuel Kant yang menganggap bahwa manusia lebih tinggi dan terhormat dibandingkan dengan makhluk lainnya karena makhluk yang bebas

¹⁹ Aristoteles, *The Politics*(Middlesex:Penguin Books 1986),hlm 79

²⁰ A.Sony Keraf *Etika Lingkungan* 2005 hlm.39

dan rasional yang mampu menggunakan dan memahami bahasa, dengan itu Tuhan menciptakan segala sesuatu di muka bumi untuk kepentingan manusia itu sendiri termasuk alam didalamnya yang secara bebas dapat dipergunakan untuk kepentingan manusia²¹.

Konvensi PBB mengenai perubahan iklim yang diwujudkan atas desakan terhadap kondisi lingkungan yang sudah rusak. Pada akhirnya telah dibawa kepada pandangan yang bercorak antroposentrisme untuk mengatasi kerusakan lingkungan tersebut ini dilandasi oleh berbagai argumen antroposentrisme yang telah dijelaskan diatas telah mengakar pada cara pandang manusia secara individual sampai pada tingkat negara, sehingga egoisme terhadap lingkungan akan berdampak juga pada arah hubungan internasional setiap negara karena menurut Mas'ood dan Arfani, negara sebagai pemilik kekuasaan efektif tertinggi dan dorongan-dorongan kekuasaan individual dari level lokal dan dipresentasikan di tingkat internasional²², Kebijakan yang sangat dangkal terhadap permasalahan lingkungan pada konvensi perubahan iklim tengah berada pada fase antroposentrisme yang memandang kepentingan manusia dalam jangka pendek dan cenderung eksplotatif adalah bentuk dari mekanisme yang dihasilkan seperti penjualan belian karbon dan pemberian kompensasi kepada pemilik hutan untuk tetap melakukan tindakan eksplotatif.

Karenanya teori lingkungan antroposentris selalu di sandingkan dengan etika lingkungan yang dangkal yang bercorak eksplotatif dan egoistis, sehingga untuk

²¹ Ibid, hal 38-39

²² Mutia Hriati Hussini. Jurnal Hubungan Internasional : *Realisme dalam Pemikiran Ekologis* hlm 73

menjelaskan kemenangan *shallow ecology* dalam konvensi perubahan iklim dunia PBB akan dapat terjawab.

1.6.2 Konsep Kapitalisme Global dan Konsep Kepentingan Nasional

Pergeseran orientasi pada kehidupan sekarang ini tidak lepas dari pengaruh kapitalisme global yang telah menjadikan segala sesuatu itu dipandang dalam satu sektor saja yakni ekonomi, sehingga memicu setiap negara dalam meraih kepentingan ekonomi tersebut walaupun harus mengorbankan aspek lainnya seperti lingkungan yang ada dalam pembahasan ini.

Kapitalisme global yang menurut William Grider dalam bukunya *One World, Ready or Not, The Global Capitalism* melontarkan bahwa sesuai dengan hakekat kapitalisme yang rakus, tidak pernah puas dan terus menguras kekayaan dunia dengan memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki terlebih lagi di sektor lingkungan yang menyediakan sumber daya alam yang menjadi bahan eksploitasi kaum kapitalis. Tindakan Eksploitasi yang dilakukan oleh kapitalis tidak dapat dibendung oleh kekuatan atau peran negara sendiri. Dan bahkan kepentingan nasional suatu negara kerap menjadi mengakomodir kepentingan kaum kapitalis.

Kepentingan nasional yang dipahami sebagai sebuah tujuan yang paling utama dalam politik luar negeri suatu negara, dimaksudkan sebagai tujuan berupa kesejahteraan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Dalam pencapaiannya, pertumbuhan ekonomi ini kerap dihadapkan pada tindakan yang bersumber dari kaum kapitalis sehingga setiap negara akan memperjuangkan kepentingan tersebut

walaupun terbentur dengan beberapa hal yang menyangkut moral dan etika yang ada. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari gaya hidup yang konsumtif yang juga ditopang dengan keberadaan industri-industri modern sehingga kepentingan ekonomi dan pertumbuhannya adalah hal utama yang harus dikejar.

Negara maju sebagai penggerak dalam konvensi perubahan iklim tentunya sangat didominasi oleh kepentingan kapitalis. Ini terlihat arogansi negara maju untuk menyepakati suatu komitmen terhadap lingkungan khususnya dalam penurunan intensitas industri yang dimiliki. Hal ini di buktikan dengan penolakan Amerika untuk meratifikasi Protokol Kyoto 1997 tentunya ini dikarenakan akan berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian AS yang bersumber dari kegiatan industri mereka. Bahkan pada Cop 6 AS menyatakan secara tegas mundur dari kesepakatan tersebut. Selain itu juga Uni Eropa menjadikan konvensi ini sebagai sebuah kepentingan ekonomi politik mereka dengan memanfaatkan posisi mereka yang berada pada tingkat emisi yang lebih rendah dari AS dan negara maju lainnya sehingga memberikan ruang bagi mereka untuk menekan industri besar negara maju lainnya. Tentunya motif ekonomi inilah yang menjadikan Uni Eropa selalu berdampingan dengan negara berkembang dalam hal penurunan emisi karbon.

Kekuatan kapitalisme global telah menggiring negara kepada tindakan yang eksploitatif demi tujuan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi harus dikejar dan semakin baik tinggi tingkat ekonomi adalah sesuatu yang baik. Adanya kepentingan ekonomi inilah yang mendasari tindakan setiap negara dalam konvensi perubahan iklim dunia menghasilkan beberapa keputusan yang sangatlah

dangkal dalam prespektif etika lingkungan sekaligus mengurangi efektifitas dari keputusan yang diambil, dimana lingkungan atau alam menjadi sub-ordinasi dari ekonomi atau pembangunan lingkungan berada di bawah pembangunan ekonomi. Sangat dominannya negara maju yang memuat kepentingan pebisnis jangka pendek, telah menjadikan pembahasan perubahan iklim dunia tidak lepas akan nilai-nilai ekonomis.

Begitu banyak kepentingan ekonomi negara maju dalam isu perubahan iklim, menyangkut dengan keberadaan Multi National Corporation (MNC) yang menopang perekonomian negara maju. Selain itu juga industrialisasi di negara maju yang tidak mungkin untuk dihentikan atau diturunkan intensitasnya dikarenakan menyangkut pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Walaupun menurut data yang ada, MNC sebagai penyumbang terbesar penyebab pemanasan global, seperti, BBF yang dihasilkan oleh MNC membuahakan 50% dari seluruh sektor industri, Gas CFC Pengendalian dan penggunaan Gas tersebut dipegang oleh MNC²³.

Indikator kekuatan kaum pebisnis dan kekuatan negara maju dapat kita lihat pada kondisi PBB saat ini yang tidak dapat keluar dari tekanan perusahaan multi nasional yang justru melakukan praktek dan eksploitasi merusak lingkungan²⁴. Ini menyangkut menguatnya lobi yang dilakukan MNC di tingkat internasional pada

²³ FX Adji Samekto,SH,MH, *Kapitalisme, Modrenisasi dan Kerusakan Lingkungan* Peran Perusahaan Multi Nasional dalm Perusakan Lingkungan (Yogyakarta : Pustaka Pelajar:2005).8

²⁴ FX Adji Samekto,SH,MH, *Kapitalisme, Modrenisasi dan Kerusakan Lingkungan* : Ekspansi Kapitalis di Era Globalisasi.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005)39. Didasarkan pada hasil penelitian Marthi Khor kok Peng Bersama Third World Net (TWN). Sumber Dokumen Balitbang KOMPAS Jakarta.

akhirnya berhasil mempengaruhi beberapa kebijakan strategis yang dapat menghalangi terhadap kelangsungan operasional MNC itu sendiri. Sehingga dengan demikian akan terlihat jelas bahwa segala sesuatu yang berupa kebijakan tidak lepas dari intervensi pelaku bisnis yang terbalut dalam kepentingan nasional. Kekuatan berupa pebisnis dan birokrasi inilah yang menjadikan kepentingan kaum kapitalis dapat terwujud.

Kepentingan negara maju untuk mempertahankan kekuatan ekonomi mereka dengan keberadaan industrinya ditanggapi sejalan oleh negara berkembang yang juga tidak lepas dari tekanan kapitalisme global ini. Dihasilkannya mekanisme CDM, JI, ET, REDD dipandang sebagai sebuah bentuk dari kepentingan ekonomi dari negara berkembang karena dengan adanya mekanisme tersebut berarti negara berkembang mendapatkan kompensasi dari penyerapan karbon yang dihasilkan oleh industri di negara maju, dengan dana tersebut negara berkembang mampu mendanai berbagai macam proyek lingkungan hidup yang menjadi masalah di negara berkembang.

Negara-negara berkembang dengan jelas-jelas mengedepankan kepentingan ekonomi dalam konvensi ini terbukti dengan berbagai perundingan mengarahkan negara berkembang untuk menyewakan hutan mereka dalam tanggungan emisi yang dibebankan kepada negara maju. Beberapa kasus memperlihatkan hal tersebut diantaranya adalah Indonesia dan juga dengan Amerika Latin yang tergabung dalam GRILA (Group Of Latin America) dalam konvensi perubahan iklim yang secara tegas memperjuangkan kepentingan mereka dalam hal

kesempatan melakukan pembangunan dengan menarik proyek-proyek CDM sebanyak mungkin. Dan juga negara afrika yang menunjukkan diri mereka sebagai korban yang paling rentan terhadap perubahan iklim sehingga membutuhkan dana untuk melakukan perbaikan, adaptasi serta beberapa penanggulangan terhadap perubahan iklim tersebut. Untuk menunjukkan kepentingan negara dalam konvensi ini dapat terlihat dalam table berikut ini :

Tabel.1.2 Aktor Dan Kepentingannya

AKTOR-AKTOR YANG TERLIBAT (Negara)	KEPENTINGAN
Uni Eropa	<ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi Energi • Mengurangi Ketergantungan Terhadap Minyak Impor
JUSSCANNZ (Jepang, United State, Switzerland Canada, Australia dan New Zealand	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat melakukan penurunan emisi di luar negeri dengan pencapaian target yang tidak ketat
Kelompok Payung	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan Energi
Rusia dan CIET (Countries with Economies in Transition)	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi setelah memasuki era ekonomi pasar • Memperdagangkan <i>hot air</i>
G77+Cina	<ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi Energi • Energi alternative yang terjangkau tinggi • Kesetaraan diantara sub Kelompok
OPEC (organization of Petroleum Exporting Countries)	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan produksi BBM tinggi • Tuntutan dana kompensasi untuk diversifikasi ekonomi • Didominasi oleh Arab Saudi dan Kuwait
GRILA (Groups Of Latin America)	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi harus dipicu • Memanfaatkan CDM
Kelompok Afrika	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat rentan terhadap kenaikan permukaan air laut • Menuntut komitmen kuat negara maju
CIET	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi

Perburuan proyek inilah yang menunjukkan lemahnya negara berkembang menghadapi kekuatan kapitalis. Pemberian kompensasi telah membutakan negara berkembang untuk tidak berkomitmen lebih ekologis terhadap permasalahan lingkungan yang dihadapi, hal itu berarti mendukung tindakan eksploitasi dan pengerusakan lingkungan lainnya. Mekanisme pemberian kompensasi ini diciptakan untuk memberikan legalitas bagi pengerusakan terhadap alam atau dengan hal ini adalah bentuk dari penebusan dosa dari pengerusakan lingkungan untuk kepentingan ekonomi, baik itu kepentingan menyangkut eksploitasi terhadap lingkungan juga pemanfaatan hutan sebagai lahan pemburuan proyek yang terlampau dangkal seperti penjelasan diatas. Sehingga konvensi perubahan iklim PBB ini didominasi oleh kekuatan kapitalisme yang menjaga hak bisnis mereka dan juga didukung oleh kepentingan negara berkembang dalam bidang ekonomi dengan pemburuan kompensasi sehingga kebijakan pada konvensi ini adalah sebuah “kamufase hijau” yang tak lebih melegalkan apa yang dilakukan terhadap lingkungan.

1.7 Hipotesa

Berdasarkan latar belakang dan melihat rumusan masalah diatas dengan menggunakan pendekatan teoritik serta kerangka konseptual maka dikemukakan bahwa pada akhirnya mekanisme yang dihasilkan dalam konvensi itu terlihat sebagai etika *Shallow* yang tercermin dalam bentuk :

1. Pengaturan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan di negara berkembang.

2. Penyelesaian masalah lingkungan dalam jangka pendek yang mengarah kepada ketidakseimbangan antara tujuan dan tindakan terhadap komitmen penyelamatan lingkungan, penanaman hutan tidak dapat diimbangi dengan kecepatan tingkat polusi industri atau kerusakan lingkungan dari negara maju yang terus dioperasikan.

1.8 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini lebih bersifat *library research* atau studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder seperti buku, majalah, serta surat kabar, disamping itu juga menggunakan media internet, televisi sebagai sarana pendukung untuk mendapatkan data terkait.

1.9 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini berfungsi untuk membatasi pembahasan pada topik permasalahan yang akan diangkat dalam sebuah penelitian ilmiah, sehingga dalam nantinya tidak terjadi perluasan penulisan yang mengakibatkan kurang fokusnya serta rancunya karya ilmiah yang dibuat.

Penulisan ini memiliki batasan mulai dari konvensi perubahan iklim COP 13 di Bali, Indonesia bulan Desember 2007 sampai dengan COP 14 di Polandia bulan Desember 2008.

SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I :

Menjelaskan mengenai alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, Kerangka dasar pemikiran, hipotesa, teknik pengumpulan data, jangkauan penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II :

Menjelaskan latar belakang masalah secara luas mengenai kerangka penyebab kerusakan ekologi dan permasalahan lingkungan global serta yang membawa kepada perubahan iklim dunia.

BAB III :

Menjelaskan mengenai hasil konvensi PBB mengenai perubahan iklim dengan melihat beberapa kerangka kerja dan mekanisme yang diputuskan dalam COP 13 Bali.

BAB IV :

Memberikan gambaran terhadap kemenangan *Shallow Ecology* dengan membandingkan mekanisme yang telah diputuskan (JI, ET, CDM, REDD) dengan gerakan *Shallow Ecology*.

BAB V :

Berisi rangkuman atau kesimpulan bab-bab pembahasan serta merupakan pembahasn terakhir dan penutup dari skripsi ini.